DAFTAR PUSTAKA

Ashari, Hasyim & Fahmid, Imam & Ali, M & Useng, Daniel. (2023). Study of Subsidized Fertilizer Distribution System in Karawang Regency, West Java-Indonesia. Journal of Advanced Zoology. 44. 300-310. 10.17762/jaz.v44i4.1525.

Direktorat Pupuk dan Pestisida. 2022. Pedoman Teknis Pupuk Bersubsidi.

Feryanto, W.K, & Mantau, Z. (2010). Pupuk dan subsidi: Kebijakan yang tidak tepat sasaran. Diunduh tanggal 16 Agustus 2019 dari http://feryanto.wk.staff.ipb.ac.id/2010/05/20/koperasi-dan-posisi-tawarpetani/.

Hotagaol, A.S., Susila, dan S. Hartoyo. 2009. Evaluasi Dampak Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk Terhadap Usaha Tani dan Pengembangan Pedesaan. Laporan Penelitian , Fakultas Ekonomi dan dan Manajemen, Institute Pertanian Bogor.

Khudori. (2008). *Ironi negeri beras*. Yogyakarta: Insist Press.

Kementerian Pertanian (Kementan). 2021. Permentan No. 49/2020. HET Pupuk Bersubsidi. Jakarta.

PSE-KP (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). 2006. Konstruksi Kebijakan Pupuk 2006. PSE-KP, Bogor.

PSE-KP (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). 2009. Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Benih, Analisis Kebijakan. PSE-KP, Bogor.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syafaat, N., M. Rachmat, dan H.P. Saliem. 1999. Alternatif Kebijaksanaan Penghapusan Subsidi Pupuk dan Pemberian Insentif Usahatani Padi. *Dalam* T. Sudaryanto (Ed.). Analisis dan Perspektif Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi. Monograph Series No. 20. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

World Bank. 2009b. Indonesia Agricultural Public Spending and Growth, Policy Note. Indonesia Agriculture Public Expenditure Review, the World Bank, Jakarta.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB V
PEMBAHASAN UMUM

Mencermati alokasi pupuk betsubsidi yang disediakan oleh Pemerintah sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 mencapai 9.8 juta ton. Dengan asumsi indek pertanaman rata-rata sebesar IP 1.3 maka secara perhitungan jumlah tersebut mampu memenuhi kebuituhan pupuk bersubsidi untuk luasan sawah saat ini yaitu 7.4 juta hektar. Permasalahan pupuk sejatinya tidak bisa diselesaikan dengan perhitungan semata, namun banyak masalah nonteknis yang menjadi pemicu timbulnya berbagai permasalahan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Perhitungan 9,8 juta ton mamou memenuhi kebituhan 7,4 juta hektar hal tersebut jika peruntukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pertanaman padi, namun kenyataannya dilapangan banyak berebutan penggunaan pupuk bersubsidi untuk sektor lain seperti usaha pertanian non padi yaitu jagung, kedelai, perkebunan rakyat bahkan perikanan rakyat.

Kebijkakan pemerintah berperan penting dalam menimbulkan berbagai permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Dari aspek kebijakan yang dikeluarkan dari proses penyediaan pupuk sampai ketersediaan ditingkat petani terlalu banyak rantai kebijakan yang dilewati melibatkan 4 (empat) kementerian lembaga dan beberapa keterlibatan BUMN, anak perusahaan BUMN serta perusahaan swasta yang mendukungnya. Alokasi anggaran dibawah kewenangan Kementerian Keuangan disesuaikan oleh ketersediaan anggaran pemerintah tanpa memandang akan kebutuhan keseluruhan masyarakat, namun memeperhatikan penilaian dari aspek hasil audit keuangan pelaksanaan pupuk bersubsudi pada tahun sebelumnya. Penyediaan produksi pupuk dilaksanakan dan dalam kendali Kementerian BUMN, sistem distribusi diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Serta kebutuhan alokasi masing-maing provinsi dan penentuan Harga Pokok Penjualan diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Pada praktek dilapangan tampak bahawa Kementerian Pertanian terlibat langsung dengan petani, dan menerima tujuan utama pengaduan dan komplain masyarakat jika terjadi permasalahan pada ketersesiaan pupuk bersubsidi di lapangan. Pada gambaran tersebut kerap kali penyebab

dilapangan adalah dikarenakan proses penyediaan sampai

ık tersebut tidak pada satu kementerian lembaga.

Jawa Barat, salah satu daerah yang menjadi fokus dalam implementasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kebijakan pupuk bersubsidi adalah Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabuapten Indramayu. Kabupaten ini dipilih karena memiliki areal pertanian yang cukup luas, sehingga menjadi representatif dalam menganalisis implementasi kebijakan pupuk bersubsidi..

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pupuk bersubsidi diimplementasikan di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas kebijakan ini di masa mendatang.

Beberapa poin penting yang perlu perhatian yang menjadi rujukan, adalah sebagai berikut;

1) **Pilihan jenis pupuk**: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi yang terdiri dari lima jenis, yaitu pupuk urea, NPK, ZA, pupuk organik, dan SP-36. Mulai tahun 2022, pemerintah mengurangi varian pupuk bersubsidi menjadi hanya dua jenis, yaitu pupuk urea dan NPK. Ini menunjukkan bahwa petani di Jawa Barat, seperti petani di seluruh Indonesia, harus menyesuaikan diri dengan perubahan jenis pupuk bersubsidi yang tersedia.

2) **Volume dan frekuensi penggunaan**: Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Barat mencapai 4,9 juta ton pada tahun 2020, yang mencakup 57% dari total realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional. Ini menunjukkan bahwa petani di Jawa Barat memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap pupuk bersubsidi.
3) **Pengaruh kebijakan**: Kebijakan pupuk bersubsidi memiliki dampak signifikan terhadap perilaku konsumen. Misalnya, kebijakan pengurangan varian pupuk bersubsidi dari lima jenis menjadi dua jenis pada tahun 2022 yang telah mempengaruhi keputusan petani tentang jenis dan jumlah pupuk yang mereka gunakan.

Pemanfaatan pupuk yakni jenis tanaman yang mendapat pupuk bersubsidi terdiri dari sembilan jenis komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, dan kopi. Ini menunjukkan bahwa petani di Jawa Barat pupuk bersubsidi untuk berbagai jenis tanaman, mencerminkan n pertanian di provinsi Jawa Barat. Analisis ini menunjukkan bahwa bersubsidi memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku petani,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

di Propinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam kebijakan ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebutuhan petani tetap terpenuhi.

Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat

1) Perencanaan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Jawa Barat bertujuan untuk mempelajari distribusi pupuk bersubsidi dari Lini II (sumber) ke Lini III (tujuan) di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan dan khususnya di Kabupaten Bandung pada Musim Tanam 1986/1987 dan Musim Tanam 1987. Pupuk bersubsidi yang dianalisis meliputi Urea, TSP, ZA, dan KCl.. Dalam mengimplementasikan kebijakan pupuk bersubsidi di Propinsi Jawa Barat, terdapat beberapa atribut produk yang perlu diperhatikan. Berikut adalah pembahasan umum mengenai atribut-atribut tersebut:
2) Analisis pelaksanaan kebijakan dan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Barat. Pelaksanaan kebijakan dan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Barat, yakni Pupuk merupakan input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, dan penelitian ini menganalisis aspek-aspek terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
3) Kajian kebijakan subsidi pupuk, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, melakukan review kebijakan subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman pangan; kedua, menganalisis perkembangan harga pupuk di tingkat petani dan pola distribusinya untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.

Kebijakan subsidi pupuk di Jawa Barat memiliki beberapa implikasi penting untuk industri pupuk, yaki peningkatan produksi dan produktivitas.Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini mencakup perencanaan jumlah permintaan pupuk, penentuan harga eceran tertinggi (HET), jumlah subsidi, dan sistem distribusi pupuk kepada petani. Namun, perencanaan jumlah permintaan pupuk seringkali kurang akurat dan pengawasan belum optimal, sehingga distribusi pupuk bersubsidi belum tepat sasaran. Olehnya itu, diperlukan perbaikan sistem untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk, dan perlu dilakukan beberapa tindakan, seperti sosialisasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi, koordinasi

posisi kios penyalur pupuk, dan pemberian sanksi pidana terhadap am penyaluran pupuk bersubsidi.

subsidi pupuk dapat mempengaruhi industri pupuk dalam hal produksi,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

distribusi, dan penjualan. Industri pupuk harus mampu memenuhi permintaan yang meningkat akibat subsidi, dan juga harus beradaptasi dengan perubahan dalam sistem distribusi dan penjualan.Pengawasan dan regulasi implementasi kebijakan pupuk bersubsidi memerlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa pupuk bersubsidi mencapai petani yang berhak. Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Jawa Barat memiliki implikasi yang signifikan bagi industri pupuk, petani, dan perekonomian secara umum.

Kebutuhan potensial dalam pemasaran tidak selalu seimbang dengan analisis perilaku konsumen. Sektor pertanian (termasuk hortikultura, florikultura, biofarmasi, dan perkebunan) terus berkembang dari tahun ke tahun. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menganalisis keunggulan kompetitif pupuk NPK lokal dibandingkan dengan pupuk NPK impor melalui sudut pandang konsumen terhadap kualitas produk di tiga kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Kerawang, Cianjur, Indramayu.

Kualitas pupuk subsidi dianalisis berdasarkan atribut produk, antara lain: ketersediaan, kandungan nutrisi, harga, bahan dasar, bentuk pupuk, kecepatan dekomposisi, label, warna, tipe, desain, dan ukuran kemasan. Hasil penilaian minat konsumen terhadap karakteristik atribut pupuk menunjukkan bahwa sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan pupuk NPK, konsumen akan mempertimbangkan kandungan nutrisi, kecepatan dekomposisi, bentuk pupuk, dan ketersediaan produk. Sikap konsumen terhadap semua kualitas atribut pupuk NPK menggambarkan bahwa pupuk impor lebih positif daripada pupuk lokal. Oleh karena itu, perusahaan atau industri pupuk harus dapat mempertahankan produksi pupuk mereka, terutama terkait kandungan nutrisi dan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Kendala dan perubahan, terdapat beberapa permasalahan yang relevan, seperti tingkat harga dan efektivitas sistem distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, ada upaya untuk mengubah pola subsidi pupuk dari tidak langsung menjadi subsidi langsung secara bertahap. Dampak perubahan besaran subsidi pupuk dapat memengaruhi permintaan atau penggunaan pupuk pada usaha pertanian dan berkontribusi pada produksi tanaman pangan.

penentuan alokasi penggunaan pupuk bersubsidi di Jawa Barat, pupuk bersubsidi telah lama diterapkan di Indonesia. Subsidi pupuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

merupakan salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi perlu diperhatikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama petani.

Mekanisme penentuan alokasi Anggaran Pupuk Bersubsidi: Penelitian ini membahas pemerintah Indonesia menentukan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi. Ini termasuk faktor-faktor ayang dipertimbangkan dalam proses ini, seperti kebutuhan pupuk di berbagai wilayah, jumlah petani yang membutuhkan bantuan, dan kondisi ekonomi negara.

Proses distribusi pupuk bersubsidi: tujuan ini berfokus pada pupuk yang bersubsidi didistribusikan di seluruh Indonesia. Ini mencakup analisis tentang pupuk tersebut mencapai petani di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau. Penelitian ini juga akan membahas tantangan dan hambatan dalam proses distribusi ini. Pengaruh penggunaan pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan Petani: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak penggunaan pupuk bersubsidi terhadap kehidupan petani yang mencakup analisis pupuk bersubsidi dapat meningkatkan produktivitas tanaman, pendapatan petani, dan akhirnya kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Subsidi pupuk dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Namun, perlu evaluasi lebih lanjut terkait efektivitasnya. Peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi fokus utama, dan pemantauan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Digitalisasi pertanian dapat membantu efisiensi pemakaian pupuk. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi di Indonesia.

BAB. VI KESIMPULAN UMUM

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan lama dalam memberikan subsidi pupuk untuk mendukung pembangunan pertanian. Alokasi subsidi ini ditentukan di tingkat pusat dan provinsi, dan kemudian dilakukan alokasi di tingkat kabupaten/kota. Proses ...ida di Jawa Barat saat ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas ...engadaan dari produsen dan/atau impor dan distribusi ke petani. ...ganut enam prinsip: jenis, kuantitas, tempat, waktu, kualitas, dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

harga. Apabila alokasi suatu daerah pada bulan tertentu tidak mencukupi, kekurangan tersebut dapat diisi dari alokasi bulan sebelumnya atau bulan berikutnya, sampai dengan batas alokasi satu tahun. Proses pendistribusiannya meliputi penyusunan dan penyerahan RDKK, yang dilanjutkan dengan pendistribusian dan penerimaan pupuk oleh petani. Seluruh stok pupuk bersubsidi wilayah Jawa Barat-Banten-DKI Jakarta disalurkan ke 68 gudang Lini III di 22 kabupaten dan 19 kota, melibatkan 190 distributor dan 3.322 kios pupuk lengkap.

Studi tersebut menyimpulkan bahwa pupuk bersubsidi di Jawa Barat, Indonesia, memberikan beberapa manfaat bagi petani, antara lain harga terjangkau, ketersediaan terjamin, kepatuhan terhadap standar mutu SNI, peningkatan minat terhadap pertanian berkelanjutan, dan peningkatan produktivitas pertanian nasional. Namun, sistem subsidi yang ada saat ini telah menimbulkan permasalahan seperti beban anggaran pemerintah, penyalahgunaan urea karena harganya yang rendah, dan kebocoran pupuk bersubsidi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, studi ini merekomendasikan penerapan bantuan tunai yang ditargetkan dan memungkinkan kekuatan pasar untuk menentukan harga pupuk dalam negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi yang efektif dan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun perlu diingat bahwa penghapusan subsidi pupuk di tingkat petani berpotensi menurunkan produktivitas hingga 9,50%.

Studi ini menyarankan untuk mempertahankan anggaran subsidi pupuk namun menyesuaikan sistem distribusi untuk memenuhi kebutuhan unik setiap petani di lokasi yang berbeda. Penelitian ini merekomendasikan pemberian dukungan kepada penyuluh melalui pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan pupuk yang akurat dan ramah lingkungan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat subsidi pupuk sekaligus memitigasi kelemahannya.

Kajian ini untuk secara komprehensif termasuk proses dan dampak penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Indramayu. Prosesnya meliputi beberapa tahapan, mulai dari ncana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) hingga penerimaan ni.

enyoroti manfaat signifikan pupuk bersubsidi bagi petani, antara lain u, ketersediaan terjamin, kepatuhan terhadap standar mutu SNI,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

meningkatnya minat terhadap pertanian berkelanjutan, dan peningkatan produktivitas pertanian nasional. Namun perlu diperhatikan bahwa penghapusan subsidi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas hingga 9,50%.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan untuk mempertahankan anggaran subsidi pupuk di Kabupaten Karawang, Cianjur dan Indramayu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap petani di lokasi yang berbeda. Selain itu, dianjurkan pemberian bantuan kepada penyuluh melalui pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan dosis serta mendorong penggunaan pupuk ramah lingkungan.

Untuk wilayah Jawa Bara yang lebih luas, studi mencatat stok pupuk bersubsidi akan disalurkan ke 68 gudang Lini III yang tersebar di 22 kabupaten dan 19 kota, dengan melibatkan 190 distributor dan 3.322 kios pupuk lengkap (KPL). Jaringan distribusi yang luas ini menunjukkan pentingnya dan jangkauan program pupuk bersubsidi.

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting pupuk bersubsidi dalam mendukung petani dan meningkatkan pendapatan petani. Hal ini memerlukan kelanjutan subsidi, dengan penyesuaian pada sistem distribusi agar dapat lebih memenuhi kebutuhan petani di berbagai lokasi. Hal ini juga menekankan perlunya dukungan dan pendidikan berkelanjutan bagi petani untuk memaksimalkan manfaat subsidi ini.

Implikasi Kebijakan

Prinsip Program yang benar terhadap kebijakan pupuk bersubsidi dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan dari produsen dan/atau impor dan distribusi ke petani sesuai dengan enam asas hak, yaitu hak jenis, jumlah, tempat, waktu, kualitas, dan harga. Skema subsidi harga diimplementasikan dalam bentuk skema subsidi harga. Dengan skema ini, rasio harga pupuk terhadap harga produk pertanian akan lebih rendah dibandingkan tanpa subsidi.

Pengawasan pupuk bersubsidi harus mencakup tingkat hulu dan hilir
esentatif mencakup proses perencanaan anggaran dan penerima
lur distribusi. Sasaran dan penerapan pemerintah perlu memperketat
nerapan pupuk bersubsidi dengan menggandeng pihak terkait agar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pupuk bersubsidi dapat efektif, tepat sasaran, dan efisien. Investasi Teknologi Pemerintah Indonesia harus mulai memotong anggaran subsidi pupuk dan mengalihkannya ke program lain, terutama terkait investasi teknologi pertanian. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari disparitas harga pupuk bersubsidi dan non-subsidi di pasaran, mengurangi kemungkinan kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi, meningkatkan praktik budaya khususnya dalam pemupukan tanaman, meningkatkan efisiensi penggunaan subsidi pemerintah, dan meningkatkan jumlah petani, pendapatan dan kesejahteraan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR LAMPIR

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PDF
Optimized using
trial version
www.balesio.com